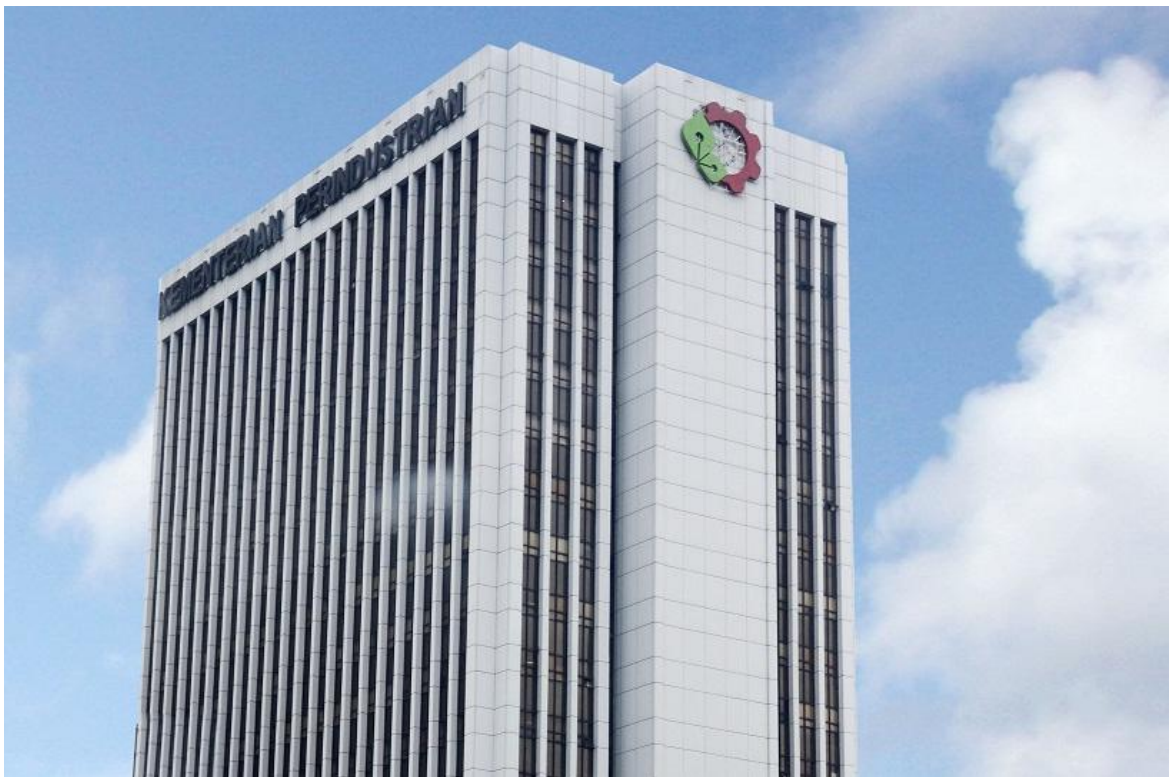


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN
TAHUN 2016**



**DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2016**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah atas kinerja yang dicapai oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun 2016 melalui perbandingan kinerja yang diperjanjikan pada awal tahun dengan kinerja yang dicapai pada tahun 2016. Pelaksanaan kegiatan tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019.

Secara umum, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan pencapaian sasaran strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun tersebut.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, sebagai umpan balik, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2017
Direktur Industri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan

Abdul Rochim

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan. Dalam mengemban tugas tersebut Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan menetapkan visi sesuai Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 yaitu “Terwujudnya industri makanan, hasil laut dan perikanan yang berdaya saing kuat dengan pemanfaatan bahan baku lokal serta mampu meningkatkan ketahanan pangan”. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 serta kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2016. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan pencapaian sasaran strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun tersebut. Pelaksanaan kegiatan tahun 2016 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri rencana strategis 2015 – 2019. Realisasi anggaran Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun ini mencapai Rp. 18.733.544.582,- (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) atau 99,96% dari total PAGU anggaran *self-blocking* sebesar Rp. 18.741.149.000,- (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau sebesar 33,67% dari total PAGU APBN-P sebesar Rp. 55.485.681.000,-.

Pada tahun 2016 ini, masing-masing sasaran strategis yang dicapai adalah: 1) Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional, 2) Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan, 3) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan, 4) Menguatnya struktur industri makanan, hasil laut dan perikanan, 5) Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standarisasi industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan 6) Mengingkatkan investasi sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal.

Capaian kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun 2016 realisasi fisik kegiatan sebesar 47,12%, capaian Perjanjian Kinerja sebesar 165,78% dan capaian Renstra 2015-2019 sebesar 238,68%. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan telah mencapai sebagian besar target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja maupun pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan tahun 2016 telah berjalan dengan cukup baik.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan tahun 2016 antara lain: a) Adanya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016 melalui mekanisme *self-blocking* dimana PAGU anggaran tetap berada pada DIPA Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, namun anggaran tersebut tidak dapat digunakan/dicairkan. Anggaran pada Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan yang terkena *self-blocking* adalah sebesar Rp 36.744.532.000,- atau mencapai 66,22% dari total PAGU anggaran semula yaitu sebesar Rp 55.485.681.000,-. Karena tidak melalui mekanisme pemotongan, maka seolah-olah anggaran tersebut belum direalisasikan, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran pada Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan terlihat sangat rendah; b) Beberapa kegiatan merupakan kegiatan baru hasil revisi anggaran APBN-P yang keluar pada bulan Juni 2016 sehingga baru mulai dilakukan tahap persiapan. Saat akan dilaksanakan proses selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut terkena kebijakan *self-blocking* anggaran; c) Adanya permasalahan terkait persyaratan impor pangan segar; d) Terganggunya persediaan kemasan sebagai akibat dari adanya wacana cukai kemasan plastik.

Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan selanjutnya adalah (a) Membuat rencana penyerapan anggaran dengan cermat sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar pelaksanaan kegiatan tepat waktu dengan serapan anggaran yang akurat; (b) Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai dengan yang telah direncanakan selama 12 bulan dan berdasarkan pada Rencana Penarikan Anggaran (RPA); (c) Meningkatkan koordinasi antar sektor-sektor terkait untuk mengatasi permasalahan penyediaan bahan baku industri, permasalahan terkait impor pangan segar dan permasalahan terkait cukai kemasan plastik.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan tahun 2016, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dalam keberhasilannya mencapai sasaran tahun 2016, sebagai bagian dari pelaksanaan Renstra tahun 2015 – 2019.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1
1.3 Peran Strategis	2
1.4 Struktur Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	12
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2016	17
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016	20
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2016.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	26
3.2 Akuntabilitas Keuangan	39
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Kendala	46
4.3 Rekomendasi	47
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis - Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.....	3
Tabel 2.1 Tahapan Pembangunan Industri Pangan	14
Tabel 2.2 Rencana Aksi Pembangunan Industri Pangan Tahun 2015-2019.....	15
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2015 – 2019	16
Tabel 2.4 Target Pembangunan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2015 – 2019	16
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2016.....	18
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2016	20
Tabel 2.7 Rencana Anggaran Tahun 2016	21
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016	26
Tabel 3.2 Capaian IKS dari Meningkatnya Peran Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Dalam Perekonomian Nasional	28
Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan	29
Tabel 3.4 Capaian IKS dari Meningkatnya Pengusahaan Pasar Di Dalam dan Luar Negeri Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	29
Tabel 3.5 Perkembangan Ekspor Industri Agro.....	30
Tabel 3.6 Capaian IKS dari Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.....	30
Tabel 3.7 Capaian IKS dari Menguatnya Struktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	31
Tabel 3.8 Capaian IKS dari Meningkatnya Daya Saing Industri Melalui Pengembangan Standardisasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	32
Tabel 3.9 Capaian IKS dari Meningkatnya Investasi Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Melalui Fasilitas Pemberian Insentif Fiskal dan Non-Fiskal	32
Tabel 3.10 Capaian IKU Berdasarkan Perspektif	33
Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun 2016	33
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Pembangunan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Pada Tahun 2016	34
Tabel 3.13 Capaian Keuangan dan Fisik Tahun 2016	37
Tabel 3.14 Rasio Capaian Kinerja Terhadap Penyerapan Anggaran.....	39
Tabel 3.15 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	11
--------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri makanan, hasil laut dan perikanan merupakan industri yang sangat penting, karena peranannya didalam ketahanan pangan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa dan penyebaran industri ke daerah-daerah. Industri ini mendapatkan bahan baku dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan yang dapat diperbarui dan tersedia cukup banyak di dalam negeri. Bahan baku tersebut dapat diproses lebih lanjut sehingga mendapatkan nilai tambah yang dihasilkan serta dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan melakukan pembinaan terhadap industri makanan, hasil laut dan perikanan agar industri dapat tumbuh dan berkembang.

Pembinaan yang dilakukan ke dalam berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya peningkatan pelayanan baik untuk intern Kementerian Perindustrian, instansi terkait, dunia usaha serta masyarakat pada umumnya. Disamping itu pembinaan dilakukan pula terhadap dunia usaha, baik berupa upaya peningkatan iklim usaha, peningkatan teknologi dan mutu produk, peningkatan kerjasama kemitraan antara industri dengan penyedia bahan baku. Selain itu juga dilakukan promosi produk-produk industri makanan, hasil laut dan perikanan baik di dalam dan luar negeri serta berupaya untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh intern kementerian, instansi terkait, dunia usaha maupun masyarakat luas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan disusun untuk mengetahui sasaran strategis yang telah dicapai oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dalam kurun waktu satu tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan masalah yang dihadapi oleh industri makanan, hasil laut dan perikanan serta program-program yang akan dilakukan pada tahun depan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan

penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
2. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
3. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
4. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
5. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
6. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

1.3 Peran Strategis

Industri makanan, hasil laut dan perikanan sebagai bagian dari industri nasional, maka Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan industri nasional secara keseluruhan. Hal ini mengingat bahwa Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan menangani dan membina industri yang mengolah hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan dan yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari dalam negeri sehingga diharapkan industri makanan, hasil laut dan perikanan mampu meningkatkan nilai tambah yang tinggi di dalam negeri serta mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi peningkatan ekspor nasional, mengurangi impor, meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta mendorong investasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka komoditi yang masuk dalam pembinaan Direktorat Industri Makanan, Hasil laut dan Perikanan meliputi :

Tabel 1.1 Jenis – Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

NO	KBLI	URAIAN
1	10130	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS
2	10212	INDUSTRI PENGASAPAN IKAN
3	10213	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN
4	10219	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN
5	10221	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG
6	10222	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG
7	10292	INDUSTRI PENGASAPAN BIOTA AIR LAINNYA
8	10293	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA
9	10299	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA
10	10411	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI
11	10412	INDUSTRI MARGARINE
12	10413	INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT
13	10421	INDUSTRI KOPRA
14	10422	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA
15	10423	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA
16	10424	INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA
17	10432	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
18	10490	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA
19	10611	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN
20	10613	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN PENERINGAN KAKAO
21	10614	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN BIJI-BIJIAN BUKAN KOPI DAN KAKAO
22	10617	INDUSTRI TEPUNG TERIGU
23	10618	INDUSTRI BERBAGAI MACAM TEPUNG DARI PADI-PADIAN, BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN, UMBI-UMBIAN DAN SEJENISNYA
24	10621	INDUSTRI PATI UBI KAYU
25	10622	INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA
26	10623	INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA
27	10629	INDUSTRI PATI LAINNYA

NO	KBLI	URAIAN
28	10632	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG
29	10633	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG
30	10634	INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG
31	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
32	10721	INDUSTRI GULA PASIR (GULA KRISTAL RAFINASI)
33	10729	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA SELAIN SIROP
34	10731	INDUSTRI KAKAO
35	10732	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA
36	10739	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA
37	10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA
38	10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN
39	10771	INDUSTRI KECAP
40	10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN (TERMASUK VETSIN/MSG)
41	10773	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA
42	10779	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA
43	10792	INDUSTRI KUE BASAH
44	10793	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU
45	10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA
46	10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA
47	10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN
48	10802	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN

Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi oleh industri makanan, hasil laut dan perikanan di antaranya adalah :

1. Kekuatan

- Indonesia merupakan negara agraris penghasil produk primer hasil tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan
- Beberapa produk memiliki keunggulan komperatif seperti Crude Palm Oil (CPO), ikan, rumput laut, kelapa bulat dan lain-lain
- Teknologi pengolahan pangan telah dikuasai
- Tenaga ahli dan tenaga kerja yang terlibat dalam industri pengolahan makanan, hasil laut dan perikanan cukup tersedia
- Produk makanan olahan dalam negeri telah mampu bersaing dengan produk impor sejenis

2. Kelemahan

- Produk primer hasil pertanian banyak yang diekspor dalam bentuk mentah seperti Crude Palm Oil (CPO) dan kelapa bulat
- Industri olahan dalam negeri kekurangan bahan baku sehingga pemanfaatan utilitasnya belum optimal (rata-rata 50%)
- Pengolahan produk pasca panen masih dilakukan secara tradisional sehingga mempengaruhi mutu produk industri makanan, hasil laut dan perikanan
- Kurangnya dukungan permodalan dan tingginya suku bunga perbankan untuk pengembangan industri makanan, hasil laut dan perikanan
- Terbatasnya industri pendukung terutama mesin, peralatan, dan kemasan
- Belum berkembangnya kesamaan persepsi mengenai mengenai otonomi daerah sehingga iklim usaha cenderung kurang kondusif dan kebijakan di daerah menjadi beragam

3. Peluang

- Meningkatnya permintaan produk makanan, hasil laut dan perikanan dengan mutu tinggi dari berbagai negara
- Berkembangnya produk makanan, hasil laut dan perikanan siap saji yang diminati konsumen eksekutif di negara-negara maju dan berkembang
- Produk makanan, hasil laut dan perikanan olahan Indonesia makin diminati negara maju dan berkembang

4. Ancaman

- Munculnya negara-negara pesaing kuat yang menghasilkan produk makanan, hasil laut dan perikanan seperti China, Taiwan, Thailand, Vietnam dan Malaysia
- Tuntutan pasar dunia terhadap produk-produk yang aman dikonsumsi dan akrab lingkungan semakin besar
- Meningkatnya penolakan produk makanan, hasil laut dan perikanan yang di ekspor ke beberapa negara karena kontaminasi fisik, biologi/mikrobiologi, kimia dan lingkungan
- Banyaknya produk makanan, hasil laut dan perikanan impor yang tidak terdaftar

1.4 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2015, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan terbagi dalam beberapa subdirektorat sebagai berikut:

- a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; Program, Evaluasi, dan Pelaporan;

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
2. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.
2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

- b. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri,

kegiatan kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan; dan

2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.
2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis

pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

c. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam,

pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

- d. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan;

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional

Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan; dan

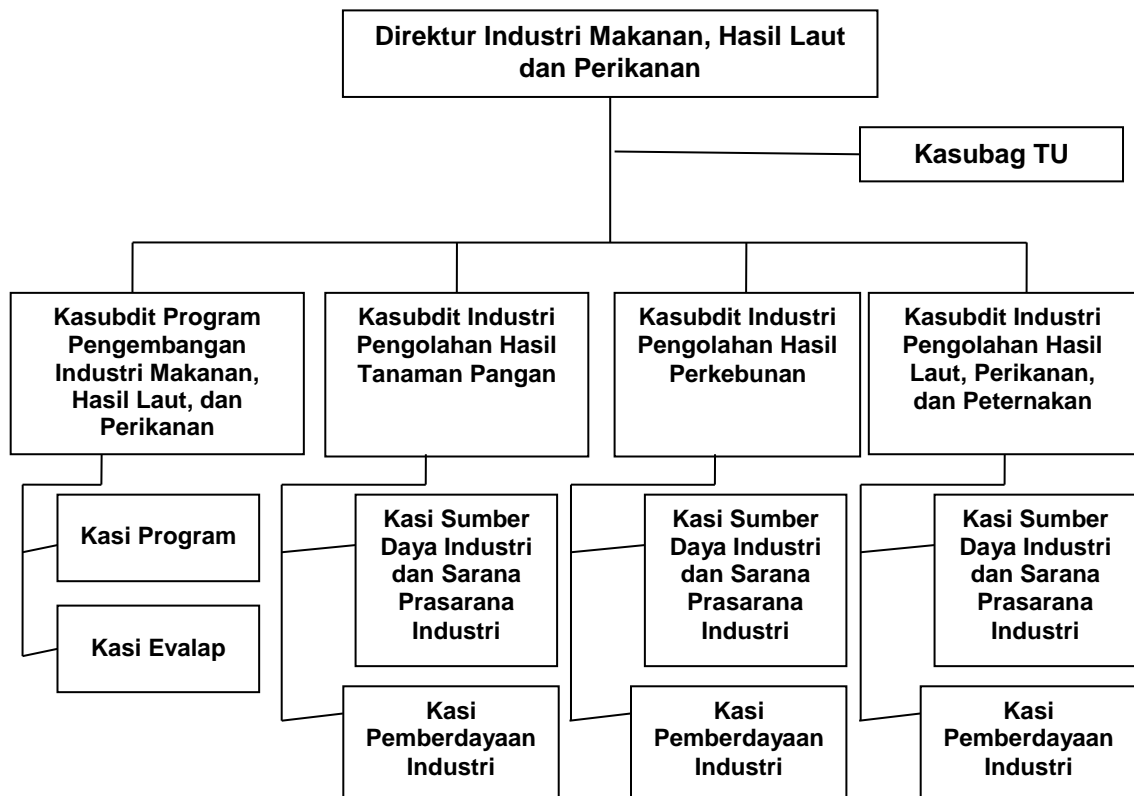
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.
2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.

e. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

Sesuai dengan tupoksi dan kewenangan pembinaannya, maka pembinaan industri makanan, hasil laut dan perikanan dibawah kewenangan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian. Untuk menunjang program pengembangan industri makanan, hasil laut dan perikanan, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mempunyai Visi, Misi dan Kebijakan sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya industri makanan, hasil laut dan perikanan yang berdaya saing kuat dengan pemanfaatan bahan baku lokal serta mampu meningkatkan ketahanan pangan

2. Misi

1. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional
2. Meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri
3. Meningkatkan mutu, produktivitas dan efisiensi
4. Meningkatkan akses pasar dan perluasan pasar ekspor
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan Industri Makanan
6. Meningkatkan kualitas SDM dan penguasaan teknologi
7. Menunjang ketahanan pangan melalui penyediaan pangan olahan

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2019 adalah tumbuhnya industri makanan, hasil laut dan perikanan yang berdaya saing kuat.

4. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 ditetapkan visi pembangunan industri nasional yaitu Memantapkan Daya Saing Basis Industri Manufaktur yang Berkelanjutan serta Terbangunnya Pilar Industri Andalan Masa Depan dengan fokus prioritas pembangunan industri agro sebagai indikator kinerja utama (IKU) adalah meningkatnya jumlah populasi usaha industri agro dengan postur yang lebih sehat.

Indikator Kinerja Utama pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan adalah meningkatnya jumlah populasi usaha industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan postur yang lebih sehat.

5. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan diwujudkan sampai dengan tahun 2019 adalah :

- Tingginya laju pertumbuhan industri makanan, hasil laut dan perikanan
- Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri
- Meningkatnya produktivitas SDM industri makanan, hasil laut dan perikanan
- Meningkatnya investasi di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri

6. Kebijakan & Strategi

Sesuai dengan kebijakan RPJMN 2015 – 2019 maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri makanan, hasil laut dan perikanan dilakukan dengan melaksanakan pembangunan industri prioritas yang mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Tahapan dan rencana aksi pembangunan untuk industri pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tahapan Pembangunan Industri Pangan

NO	INDUSTRI PRIORITAS	JENIS INDUSTRI		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
1	INDUSTRI PANGAN	Industri Pengolahan Ikan		
		1. Ikan awet (beku, kering, dan asap) dan <i>fillet</i>		
		2. Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk <i>carrageenan</i> , minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya)		
		Industri Pengolahan Susu		
			1. Susu untuk kesehatan (susu cair, bubuk dan <i>condensed</i>)	1. Susu untuk kesehatan (susu cair, bubuk dan <i>condensed</i>)
			2. <i>Probiotic</i> dan pangan fungsional lainnya berbasis susu	2. <i>Probiotic</i> dan pangan fungsional lainnya berbasis susu
		Industri Bahan Penyegar		
		1. Bubuk coklat	1. Kopi dekafeinasi	1. <i>High value tea</i>
		2. Lemak coklat	2. Aneka pangan olahan berbasis kopi organik	2. Suplemen berbasis teh
		3. Makanan dan minuman dari coklat	3. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi	
4. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao	4. <i>High value tea</i>			
	5. Suplemen berbasis teh			
Industri Pengolahan Minyak Nabati				
	1. <i>Fortified cooking oil</i> (natural dan non-natural)			
	2. Pangan fungsional berbasis minyak nabati			
Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran				
	1. Buah/sayuran dalam kaleng			
	2. <i>Fruit/vegetable layer</i>			
	3. Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah			
Industri Tepung				
	1. Pati dari biomassa limbah pertanian	1. Tepung gandum tropika		
	2. Pangan darurat	2. Pati dari biomassa limbah pertanian		
		3. Pangan darurat		
		4. <i>Granulated composit flour</i>		
Industri Gula Berbasis Tebu				
	1. Gula pasir	Gula pasir*		
	2. Gula cair dan asam organik dari limbah industri gula			
	Ket : * khusus di luar Jawa			

Tabel 2.2 Rencana Aksi Pembangunan Industri Pangan
Tahun 2015-2019

NO.	INDUSTRI PRIORITAS	RENCANA AKSI
1.	<p><u>INDUSTRI PANGAN</u></p> <p>a. Industri Pengolahan Ikan: Ikan awet (beku, kering, asap) dan <i>fillet</i>, Aneka olahan ikan, rumput laut dan hasil laut lainnya (termasuk carrageenan, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya).</p> <p>b. Industri Bahan Penyegar *): bubuk cokelat, lemak cokelat, makanan dan minuman dari cokelat, suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao.</p> <p>c. Industri Pengolahan Minyak Nabati: <i>Fortified cooking oil</i> (natural dan <i>non-natural</i>), pangan fungsional berbasis minyak nabati.</p> <p>d. Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayur-sayuran *): Buah/sayuran dalam kaleng, <i>fruit/vegetable layer</i>, suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah.</p> <p>e. Industri Tepung: Pati dari biomassa limbah pertanian, Pangan darurat</p> <p>f. Industri Gula Berbasis Tebu: Gula pasir, Gula cair, dan asam organik dari limbah industri gula.</p> <p>*) Dilaksanakan oleh Direktorat Industri Minuman, Tembakau dan Bahan Penyegar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai. 2. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui diklat industri dan pendampingan 3. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi 4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP dan HACCP, sertifikasi SNI dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu; 5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan. 6. Memfasilitasi pembebasan PPN atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil. 7. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah. 8. Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor. 9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 31.1/M-IND/PER/3/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019, maka target pembangunan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun 2015 - 2019 adalah :

Tabel 2.3. Target Indikator Kinerja Utama Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2015 – 2019

No	Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan populasi usaha industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan postur yang lebih sehat	Unit Usaha	19	22	23	24	30

Tabel 2.4. Target Pembangunan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun 2015 – 2019

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingginya laju pertumbuhan industri makanan, hasil laut dan perikanan	Persen	7,5	7,7	8,1	8,4	8,7
	- Laju pertumbuhan industri makanan hasil laut dan perikanan	Persen	7,5	7,7	8,1	8,4	8,7
	- Kontribusi industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB Nasional	Persen	4,0	4,0	4,0	4,01	4,02
2	Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri industri makanan, hasil laut dan perikanan	Persen	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
	- Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap ekspor nasional	Persen	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7
	- Pangsa pasar produk industri makanan hasil laut	Persen	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	dan perikanan nasional terhadap total permintaan pasar dalam negeri						
3	Meningkatnya produktivitas SDM industri makanan hasil laut dan perikanan	Persen	15,0	16,0	20,0	25,0	30,0
	- Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri	Rupiah/tenaga kerja	260.000	299.000	358.800	448.500	583.050
4	Meningkatnya investasi di sektor industri makanan hasil laut dan perikanan	Jumlah izin usaha	85	100	115	130	145
	- Nilai realisasi investasi PMDN dan PMA	Rp. Triliun	40	42	44,1	46,3	48,6
5	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri makanan hasil laut dan perikanan	Persen	1,0	1,33	0,66	1,31	1,29
	- Jumlah tenaga kerja yang diserap industri makanan hasil laut dan perikanan	Juta orang	0,6	0,63	0,66	0,69	0,73

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, maka rencana kinerja, indikator dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
PERSPEKTIF STAKEHOLDER			
1.	Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional	Laju pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan • Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Eselon II
2.	Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap ekspor nasional setiap tahunnya	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Yang Mendapatkan Fasilitas Promosi Produk dan Investasi • Perusahaan Yang Difasilitasi Pada Promosi/Pameran Produk IMHLP
3.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kemampuan SDM Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan • SDM Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Yang Mengikuti Diklat • SKKNI Pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan • RSKKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
4.	Menguatnya struktur industri makanan, hasil laut dan perikanan	Rasio impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal terhadap PDB industri non migas	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman, Hibah dan/atau Penyertaan Modal Bagi IMHLP • Bantuan Mesin dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan IMHLP • Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas IMHLP
PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL			
1.	Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri makanan, hasil laut dan perikanan	Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan • Rancangan Standar Nasional Indonesia Terkait Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan • SNI Wajib Terkait Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan • Perusahaan Berbasis Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Yang Menetapkan Standar Mutu • Pengawasan SNI Wajib Terkait Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
2.	Meningkatnya investasi sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan melalui fasilitas pemberian insentif fiskal dan non-fiskal	Nilai investasi di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Pengembangan dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan • Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan didukung pembiayaan dan mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka ditetapkan perjanjian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
PERSPEKTIF STAKEHOLDER				
1	Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional	1. Laju pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan	7,5	Persen
		2. Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional	4,0	Persen
2	Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap ekspor nasional setiap tahunnya	3,55	Persen
3	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	3,57	Juta Orang
4	Menguatnya struktur industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Rasio impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal terhadap PDB industri non migas	5	Persen
PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL				
1	Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	8	RSNI
2	Meningkatnya investasi sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Nilai investasi di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	34,28	Rp Triliun

perikanan melalui fasilitas pemberian insentif fiskal dan non-fiskal			
----------------------------------------------------------------------	--	--	--

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2016

Pada Tahun 2016, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan semula memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 105.683.581.000,-**. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang terjadi, pada bulan Juni tahun 2016 Pemerintah menetapkan APBN-Perubahan sehingga alokasi anggaran untuk Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan berubah menjadi sebesar **Rp. 55.485.681.000,-**. Namun dalam rangka melanjutkan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 26 Agustus 2016 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016 yang menginstruksikan Pimpinan K/L untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme blokir mandiri (**self blocking**). Penghematan dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas, paket meeting, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, operasional perkantoran lainnya, serta anggaran dari kegiatan yang belum dilakukan kontrak pelaksanaan pekerjaan. Setelah dilakukan *self blocking*, alokasi anggaran untuk Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan menjadi sebesar **Rp. 18.741.149.000,-**:

Tabel 2.7 Rencana Anggaran Tahun 2016

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU APBN-P	PAGU SELF BLOCKING
7	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	55,485,681,000	18,741,149,000
1835	Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	55,485,681,000	18,741,149,000
1835.02	Rekomendasi Pengembangan Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	999,965,000	584,293,000
1	Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha Industri	861,775,000	509,556,000
51	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Laut	90,120,000	62,695,000

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU APBN-P	PAGU SELF BLOCKING
52	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Kelapa	91,220,000	39,741,000
53	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pakan	199,995,000	82,940,000
55	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Makanan Berbasis Crude Palm Oil (cpo)	42,710,000	23,750,000
56	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Tepung Non Gandum	53,440,000	36,502,000
57	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Gula	161,025,000	117,482,000
58	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Makanan Hasil Perkebunan	106,450,000	73,364,000
59	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Tanaman Pangan	116,815,000	73,082,000
2	Rekomendasi Peningkatan Daya Saing Industri	41,440,000	24,840,000
66	Partisipasi Pada Sidang Standarisasi Internasional	41,440,000	24,840,000
3	Rekomendasi Peningkatan Invenstasi Industri	96,750,000	49,897,000
67	Partisipasi Dalam Forum Kerjasama Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan	96,750,000	49,897,000
1835.02	Standar Pada Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	396,715,000	246,865,000
51	Perumusan Dan Revisi Sni Industri Makanan	199,380,000	115,274,000
52	Pengawasan Sni Wajib Produk Industri Makanan Hasil Tanaman Pangan	36,050,000	28,078,000
53	Penyusunan Peraturan Penerapan Sni Wajib Produk Makanan, Hasil Tanaman Pangan	105,440,000	70,084,000
54	Penyusunan, Revisi Dan Pengawasan Pemberlakuan Sni Wajib Produk Industri Makanan Hasil Perkebunan	55,845,000	33,429,000
1835.02	Skni Pada Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	152,545,000	114,710,000
51	Penyusunan Rskkni Di Bidang Industri Minyak Goreng Sawit	24,000,000	21,475,000
52	Penyusunan Rskkni Di Bidang Industri Biskuit	24,875,000	23,475,000
53	Penyusunan Rskkni Di Bidang Industri Mi Instan	25,875,000	24,075,000
54	Penyusunan Kkni Industri Pengolahan Daging	77,795,000	45,685,000
1835.02	Industri Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman, Hibah Dan/atau Penyertaan Modal Bagi Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	107,224,000	73,232,000

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU APBN-P	PAGU SELF BLOCKING
51	Bantuan Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan Rumput Laut Dalam Rangka Pengembangan Pusat Pendidikan Dan Teknologi Proses Pengolahan Rumput Laut Terpadu	27,224,000	27,224,000
52	Bantuan Alat Pendingin Blast Freezer Untuk Industri Pengolahan Ikan Di Banda	80,000,000	46,008,000
1835.02	Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	122,080,000	79,161,000
51	Penerapan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Melalui Cppob Pada Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	56,020,000	49,779,000
52	Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri Pakan Ternak	39,780,000	26,232,000
54	Pelatihan Sdm Industri Pengolahan Rumput Laut	26,280,000	3,150,000
1835.03	Perusahaan Yang Mendapatkan Fasilitas Promosi Produk Dan Investasi	166,620,000	159,655,000
51	Partisipasi Pada Pelaksanaan Pameran Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Di Dalam Negeri	57,100,000	52,450,000
52	Partisipasi Pelaksanaan Pada Pameran Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Di Luar Negeri	109,520,000	107,205,000
1835.03	Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	346,010,000	257,588,000
51	Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	78,500,000	70,784,000
52	Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	144,450,000	137,715,000
53	Penyusunan Laporan, Pendataan Dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	123,060,000	49,089,000
1835.03	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	3,923,785,000	1,129,013,000
1	Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal	1,158,565,000	181,896,000
55	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Makanan Berbasis Crude Palm Oil (cpo)	719,590,000	51,180,000
57	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Gula	438,975,000	130,716,000
2	Rekomendasi Kebijakan Insentif Non-fiskal	2,765,220,000	947,117,000
51	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Laut	509,880,000	154,273,000
52	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Kelapa	508,780,000	107,952,000
56	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Tepung Non Gandum	546,560,000	179,277,000

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU APBN-P	PAGU SELF BLOCKING
64	Penyusunan Feasibility Study Dan Detail Engineering Design (ded) Industri Pengolahan Rumput Laut Di Sulawesi Selatan	1,200,000,000	505,615,000
1835.03	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktifitas Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	6,146,217,000	2,790,430,000
1	Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal	1,140,190,000	756,200,000
53	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pakan	340,190,000	86,025,000
60	Kajian Pengembangan Produk Industri Pengolahan Kelapa	800,000,000	670,175,000
2	Rekomendasi Kebijakan Insentif Non-fiskal	5,006,027,000	2,034,230,000
54	Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Revitalisasi Industri Gula	500,000,000	0
58	Partisipasi Dalam Forum Kerjasama Dan Iklim Usaha Industri Makanan Hasil Perkebunan	996,800,000	198,597,000
59	Partisipasi Dalam Forum Kerjasama Dan Iklim Usaha Industri Tanaman Pangan	447,417,000	66,379,000
61	Verifikasi Kontrak Penjualan Dan Penyaluran Gula Kristal Rafinasi	1,600,000,000	1,561,900,000
66	Partisipasi Pada Sidang Standarisasi Internasional	758,560,000	68,164,000
67	Partisipasi Dalam Forum Kerjasama Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan	703,250,000	139,190,000
1835.03	Rancangan Standar Nasional Indonesia Terkait Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	1,850,134,000	198,433,000
51	Perumusan Dan Revisi Sni Industri Makanan	1,147,804,000	53,007,000
54	Penyusunan, Revisi Dan Pengawasan Pemberlakuan Sni Wajib Produk Industri Makanan Hasil Perkebunan	702,330,000	145,426,000
1835.03	Sni Wajib Terkait Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	583,770,000	142,607,000
53	Penyusunan Peraturan Penerapan Sni Wajib Produk Makanan, Hasil Tanaman Pangan	583,770,000	142,607,000
1835.03	Perusahaan Berbasis Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Yang Menerapkan Standar Mutu	443,980,000	302,550,000
51	Penerapan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Melalui Cppob Pada Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	443,980,000	302,550,000
1835.04	Pengawasan Sni Wajib Terkait Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	749,385,000	106,686,000
52	Pengawasan Sni Wajib Produk Industri Makanan Hasil Tanaman Pangan	749,385,000	106,686,000

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU APBN-P	PAGU SELF BLOCKING
1835.04	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (rskkni) Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	3,047,455,000	363,915,000
51	Penyusunan Unit Kompetensi Pada Rskkni Di Bidang Industri Gula Rafinasi	726,000,000	111,182,000
52	Penyusunan Unit Kompetensi Pada Rskkni Di Bidang Industri Tepung Terigu	725,125,000	79,084,000
53	Penyusunan Unit Kompetensi Pada Rskkni Di Bidang Industri Mi Instan	724,125,000	80,845,000
54	Penyusunan Rskkni Industri Pengolahan Daging Pada Sub Bidang Produksi	872,205,000	92,804,000
1835.04	Sdm Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Yang Mengikuti Diklat	703,608,000	164,089,000
52	Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri Pakan Ternak	329,888,000	164,089,000
54	Pelatihan Sdm Industri Pengolahan Rumput Laut	373,720,000	0
1835.04	Bantuan Mesin Dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	28,092,776,000	8,466,637,000
51	Bantuan Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan Rumput Laut Dalam Rangka Pengembangan Pusat Pendidikan Dan Teknologi Proses Pengolahan Rumput Laut Terpadu	4,172,776,000	3,726,937,000
52	Bantuan Alat Pendingin Blast Freezer Untuk Industri Pengolahan Ikan Di Banda	4,920,000,000	4,739,700,000
53	Bantuan Mesin Dan Atau Peralatan Industri Gula	19,000,000,000	0
1835.04	Perusahaan Yang Difasilitasi Pada Promosi/pameran Produk Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	4,761,980,000	2,193,962,000
51	Partisipasi Pada Pelaksanaan Pameran Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Di Dalam Negeri	2,104,040,000	121,043,000
52	Partisipasi Pelaksanaan Pada Pameran Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Di Luar Negeri	2,657,940,000	2,072,919,000
1835.05	Dukungan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Unit Eselon Ii	2,891,432,000	1,367,323,000
51	Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	604,267,000	526,729,000
52	Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	533,850,000	341,126,000
53	Penyusunan Laporan, Pendataan Dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	753,315,000	210,507,000
62	Evaluasi Kinerja Industri Pengguna Gula Impor	1,000,000,000	288,961,000
	T O T A L	55,485,681,000	18,741,149,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Secara umum Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian target-target sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2016. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target atas indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran pada awal tahun seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

3.1.1. Analisis Capaian Kinerja

Penilaian atas pelaksanaan tugas Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan tahun 2016 sebagaimana yang ditunjukkan oleh pencapaian sasaran dimaksud seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi
PERSPEKTIF STAKEHOLDER				
1	Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional	1. Laju pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan	7,5 Persen	9,82 Persen
		2. Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional	4,0 Persen	5,99 Persen

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi
2	Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap ekspor nasional setiap tahunnya	3,5 Persen	23,93 Persen
3	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	3,57 Juta Orang	4,33 Juta Orang
4	Menguatnya struktur industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Rasio impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal terhadap PDB industri non migas	5 Persen	12,48 Persen
PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL				
1	Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standarisasi industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	8 RSNI	0 RSNI
2	Meningkatnya investasi sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan melalui fasilitas pemberian insentif fiskal dan non-fiskal	2. Nilai investasi di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	34,28 Triliun Rupia	45,56 Triliun Rupiah

A. Perspektif Stakeholder

1. Meningkatkan peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional

Peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional merupakan salah satu parameter untuk mengukur perkembangan kinerja industri. Sasaran ini dicapai melalui Indikator Kinerja Sasaran (IKS):

- 1) Laju pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan
- 2) Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional

Tabel 3.2 Capaian IKS dari Meningkatnya Peran Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Dalam Perekonomian Nasional

Sasaran Strategis	IKS	2015	TW III 2016		Satuan	
		Realisasi	Target	Realisasi		Capaian (%)
Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional	Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap ekspor nasional setiap tahunnya	7,54	7,5	9,82	130,9	Persen
	Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional	6,02	4	5,99	149,8	persen

Berdasarkan data pertumbuhan hingga triwulan III tahun 2016, laju pertumbuhan industri makanan dan minuman meningkat menjadi sebesar 9,82%. Nilai tersebut lebih besar dari target yang ditetapkan, sehingga nilai capaian adalah sebesar 130,9%. Capaian tahun ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015 diantaranya karena harga komoditi global yang terus membaik.

Kontribusi PDB industri makanan dan minuman terhadap PDB nasional adalah sebesar 5,99%. Capaian tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan target dengan nilai capaian sebesar 149,8%. Kontribusi PDB industri makanan dan minuman terhadap PDB nasional mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Kontribusi PDB industri makanan dan minuman tahun 2016 masih dihitung sampai dengan triwulan III. Dengan kondisi ekonomi yang terus membaik, pertumbuhan industri makanan dan minuman yang selalu positif, serta tingginya permintaan maka tidak menutup kemungkinan sampai dengan triwulan IV tahun 2016, kontribusi PDB industri makanan dan minuman terhadap PDB nasional pada tahun 2016 akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan

LAPANGAN USAHA	2014*												2015**			2016***			Satuan : Persen
	I	II	III	IV	Jumlah	I	II	III	IV	Jumlah	I	II	III						
	Industri Pengolahan	4,46	4,83	4,98	4,18	4,61	4,01	4,11	4,51	4,35	4,25	4,62	4,64	4,56					
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-2,54	-0,56	-0,39	-5,95	-2,38	-4,98	-4,26	-1,36	3,77	-1,76	5,85	5,77	3,34						
2 Industri Pengolahan Non Migas	5,51	5,59	5,73	5,61	5,61	5,26	5,22	5,28	4,43	5,04	4,47	4,50	4,71						
Industri Makanan dan Minuman	9,42	10,86	10,08	7,64	9,49	8,16	8,48	6,94	6,64	7,54	7,62	8,14	9,82						
Industri Pengolahan Tembakau	11,33	9,95	8,93	3,56	8,33	0,45	4,61	8,63	11,84	6,43	5,90	3,62	0,35						
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	3,02	2,65	1,38	-0,76	1,56	-1,65	-6,13	-6,24	-5,06	-4,79	-1,34	-0,07	-0,78						
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	6,44	7,79	4,12	4,28	5,62	3,68	3,86	2,49	5,81	3,98	9,32	8,74	6,94						
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	5,87	5,12	7,14	6,39	6,12	1,41	-2,13	-3,96	-2,59	-1,84	2,33	2,21	0,86						
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,06	5,32	6,20	2,84	3,58	-0,39	-3,40	0,98	2,54	-0,11	-1,37	5,17	3,28						
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	4,63	4,22	1,12	6,20	4,04	9,65	6,79	10,18	2,97	7,36	-2,04	5,18	8,99						
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,44	1,29	1,92	-3,94	1,16	-3,49	8,62	7,04	8,53	5,05	-4,14	-11,51	-12,08						
Industri Barang Galian bukan Logam	1,05	0,18	0,77	7,53	2,41	5,00	9,09	6,56	4,24	6,18	8,02	4,06	7,28						
Industri Logam Dasar	3,04	5,49	7,58	7,83	6,01	9,14	7,47	4,61	4,92	6,48	8,26	0,91	-5,28						
Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,86	-0,72	4,11	7,51	2,94	8,22	9,52	6,25	7,42	7,83	8,08	2,14	6,20						
Industri Mesin dan Perlengkapan	8,65	12,10	7,24	6,83	8,67	-2,83	4,04	14,86	14,05	7,49	15,58	9,40	0,12						
Industri Alat Angkutan	4,06	2,00	3,37	6,54	4,01	5,05	0,75	4,16	-0,42	2,33	3,36	7,80	3,27						
Industri Furnitur	2,44	3,74	4,63	3,56	3,60	5,05	7,25	5,08	2,60	5,00	0,58	-0,15	0,13						
Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	14,62	10,57	3,35	3,04	7,65	3,08	5,64	8,86	2,08	4,89	0,03	-2,42	-4,53						
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	4,96	5,01	4,94	5,17	5,02	4,44	4,10	3,86	4,01	4,10	4,73	4,95	4,40						
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	12,78	2,84	6,07	-0,09	5,13	16,64	27,30	36,01	46,55	31,98	11,55	13,06	21,84						
PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,14	4,96	4,97	5,04	5,02	4,73	4,66	4,74	5,04	4,79	4,91	5,19	5,02						

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin
Catatan : * Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara; *** Angka Sangat-sangat Sementara

- Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan

Sasaran ini dicapai melalui indikator Kinerja Sasaran (IKS) kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap ekspor nasional setiap tahunnya.

Tabel 3.4 Capaian IKS dari Meningkatnya Penguasaan Pasar Di Dalam dan Luar Negeri Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Sasaran Strategis	IKS	2015	2016		Satuan	
		Realisasi	Target	Realisasi		Capaian (%)
Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap ekspor nasional setiap tahunnya	3,5	3,55	23,93	674	Persen

Kontribusi ekspor produk industri makanan dan minuman terhadap ekspor nasional tahun 2016 adalah sebesar US\$ 26,28 Miliar dari

total ekspor Indonesia sebesar US\$ 109,76 Miliar atau sebesar 23,93%. Nilai tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sehingga nilai capaiannya adalah sebesar 674%. Kontribusi ekspor ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 3,5%. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus membaik di tahun 2016 sebagai dampak positif dari harga komoditi global yang terus membaik.

Tabel 3.5 Perkembangan Ekspor Industri Agro

JENIS INDUSTRI	NOVEMBER	DESEMBER*)	JAN-DES	JAN-DES	JAN-DES*)
	2016	2016	2014	2015	2016
TOTAL EKSPOR INDUSTRI PENGOLAHAN	10.146.865,96	10.102.506,26	119.753.706,44	108.603.494,32	109.762.981,58
TOTAL EKSPOR INDUSTRI AGRO	3.917.384,73	3.932.186,82	41.945.181,53	38.500.970,79	37.813.967,79
INDUSTRI MAKANAN	2.936.734,34	2.917.427,28	29.582.126,53	26.448.213,52	26.276.343,14
INDUSTRI MINUMAN	9.904,57	10.618,36	70.294,66	91.091,60	117.896,27
INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	80.880,16	88.735,88	942.271,84	922.774,49	959.466,48
INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBUI, ROTAN DAN SEJENISNYA	334.031,80	315.914,38	3.996.147,97	3.901.954,50	3.744.209,97
INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	418.155,03	455.974,02	5.553.187,65	5.383.853,99	5.066.744,66
INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	3.705,51	1.420,90	34.006,89	39.204,05	31.561,41
INDUSTRI FURNITUR	133.973,32	142.096,00	1.767.146,00	1.713.878,64	1.617.745,86
Catatan : *) Angka Sementara					

3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan

Sasaran ini dicapai melalui indikator Kinerja Sasaran (IKS) jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan Industri.

Tabel 3.6 Capaian IKS dari Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Sasaran Strategis	IKS	2015	TW III 2016		Satuan	
		Realisasi	Target	Realisasi		Capaian (%)
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	3,65	3,57	4,33	121,3	Juta Orang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah tenaga kerja kumulatif sampai dengan tahun 2016 sesuai KBLI industri makanan

adalah sebesar 4,33 juta orang. Hal ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,57 juta orang sehingga nilai capaian untuk sasaran ini adalah sebesar 121,3%. Jumlah penyerapan tenaga kerja ini juga melebihi capaian pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,65 juta orang. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang terus membaik serta pertumbuhan yang signifikan dari industri makanan dan minuman pada tahun 2016.

4. Menguatnya struktur industri makanan, hasil laut dan perikanan

Sasaran ini dicapai melalui indikator Kinerja Sasaran (IKS) rasio impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal terhadap PDB industri non migas.

Tabel 3.7 Capaian IKS dari Menguatnya Struktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Sasaran Strategis	IKS	TW III 2016			Satuan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Menguatnya struktur industri makanan, hasil laut dan perikanan	Rasio impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal terhadap PDB industri non migas	5	12,48	249,6	Persen

Impor bahan baku/bahan sampai dengan triwulan III tahun 2016 adalah sebesar US\$ 73,57 Juta dan impor barang modal sebesar US\$ 16,06 Miliar, sedangkan PDB Non-Migas adalah sebesar 573,26 Triliun Rupiah. Dengan menggunakan kurs 1 US\$ = Rp 13.300,- maka didapatkan nilai rasio impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal terhadap PDB industri non migas adalah sebesar 12,48%. Dari target yang ditetapkan sebesar 5%, maka capaian untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 249,6%.

B. Perspektif Bisnis Internal

1. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri makanan, hasil laut dan perikanan

Sasaran ini dicapai melalui indikator Kinerja Sasaran (IKS) jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan.

Tabel 3.8. Capaian IKS dari Meningkatnya Daya Saing Industri Melalui Pengembangan Standardisasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Sasaran Strategis	IKS	2016			Satuan
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri makanan, hasil laut dan perikanan	Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	8	0	0	Persen

Pada tahun 2016, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan merencanakan penyusunan 8 (delapan) RSNI terkait komoditi industri makanan, hasil laut dan perikanan. Sampai dengan triwulan II telah dilaksanakan rapat-rapat persiapan dan rapat koordinasi penyusunan RSNI. Namun pada bulan Agustus 2016, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran melalui mekanisme *self-blocking* sehingga pelaksanaan penyusunan RSNI tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, capaian IKS untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 0% atau tidak tercapai.

- Meningkatnya investasi sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan melalui fasilitas pemberian insentif fiskal dan non-fiskal.

Sasaran ini dicapai melalui indikator Kinerja Sasaran (IKS) nilai investasi di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan

Tabel 3.9 Capaian IKS dari Meningkatnya Investasi Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Melalui Fasilitas Pemberian Insentif Fiskal dan Non-Fiskal

Sasaran Strategis	IKS	2015	TW III 2016			Satuan
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya investasi sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan melalui fasilitas	Nilai investasi di sektor industri makanan, hasil laut dan	44,77	34,28	45,56	132,9	Triliun Rupiah

pemberian insentif fiskal dan non-fiskal	perikanan					
------------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--

Realisasi investasi PMDN sektor industri makanan sampai dengan triwulan III tahun 2016 adalah sebesar 7.369,63 Miliar Rupiah dan realisasi investasi PMA adalah sebesar 632,24 Juta US Dollar atau total keseluruhan sebesar 45,56 Triliun Rupiah. Realisasi investasi sektor industri makanan ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 34,28 Triliun Rupiah sehingga capaian untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 132,9%. Jika dibandingkan dengan realisasi investasi pada tahun 2015, maka pada tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 79 Miliar Rupiah. Kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik di tahun 2016, mampu meningkatkan iklim investasi industri sehingga realisasi investasi pada tahun 2016 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Secara umum pencapaian sasaran strategis berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Capaian IKU Berdasarkan Perspektif

No.	Perspektif	Capaian (%)	
		2015	2016
1	Perspektif <i>Stakeholders</i>	96,62	265,12
2	Perspektif Bisnis Internal	78,52	66,45
Rata-rata		87,57	165,78

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja Rencana Strategis 2015 - 2019

Berdasarkan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan, secara umum capaian kinerja terhadap dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun 2016

No.	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan populasi usaha industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan postur yang lebih sehat	Unit usaha	22	12	54,5

Berdasarkan IKU yang telah disusun, pertumbuhan populasi unit usaha industri makanan, hasil laut dan perikanan yang telah beroperasi adalah sebanyak 12 perusahaan dari target 22 unit usaha. Data investasi didapatkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dari perusahaan-perusahaan PMDN maupun PMA yang diterbitkan pada tahun 2016 dari investasi di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah :

1. CV. Bumi Indo
2. PT. Sintong Abadi
3. PT. QL Agrofood
4. PT. Yuxing Algae International
5. PT. URC Indonesia
6. PT. Plangi Jaya Indonesia
7. PT. Bahari Makmur Sejati
8. PT. Bahari Pratama Mandiri
9. PT. Karyacipta Buanasentosa
10. PT. Matahari Aqua Presperindo
11. PT. Pingroun Food Jakarta
12. PT. Malindo Feedmill

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Pembangunan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Pada Tahun 2016

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
1	Tingginya laju pertumbuhan industri makanan, hasil laut dan perikanan	Persen	7,7	9,82	127,5
	- Laju pertumbuhan industri makanan hasil laut dan perikanan	Persen	7,7	9,82	127,5
	- Kontribusi industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB Nasional	Persen	4,0	5,99	149,7
2	Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri industri makanan, hasil laut dan perikanan	Persen	5,1	5,17	101,3
	- Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut	Persen	3,55	23,93	674

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
	dan perikanan terhadap ekspor nasional				
	- Pangsa pasar produk industri makanan hasil laut dan perikanan nasional terhadap total permintaan pasar dalam negeri	Persen	5,1	5,17	101,3
3	Meningkatnya produktivitas SDM industri makanan hasil laut dan perikanan	Persen	16,0	27,8	173,7
	- Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri	Rupiah/tenaga kerja/jam	299.000	382.200	127,8
4	Meningkatnya investasi di sektor industri makanan hasil laut dan perikanan	Jumlah izin usaha	100	67	67
	- Nilai realisasi investasi PMDN dan PMA	Rp. Triliun	42	45,56	108,4
5	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri makanan hasil laut dan perikanan	Persen	1,33	8,8	661,6
	- Jumlah tenaga kerja yang diserap industri makanan hasil laut dan perikanan	Juta orang	0,63	2,8	444,4

Berdasarkan data pertumbuhan hingga triwulan III tahun 2016, laju pertumbuhan industri makanan dan minuman meningkat menjadi sebesar 9,82%. Nilai tersebut lebih besar dari target yang ditetapkan, sehingga nilai capaian adalah sebesar 130,9%. Capaian tahun ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015 diantaranya karena harga komoditi global yang terus membaik.

Kontribusi PDB industri makanan dan minuman terhadap PDB nasional adalah sebesar 5,99%. Capaian tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan target dengan nilai capaian sebesar 149,8%. Kontribusi PDB industri makanan dan minuman terhadap PDB nasional mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Kontribusi PDB industri makanan dan minuman tahun 2016 masih dihitung sampai dengan triwulan III. Dengan kondisi ekonomi yang terus membaik, pertumbuhan industri makanan dan minuman yang selalu positif, serta tingginya permintaan maka tidak menutup kemungkinan sampai dengan triwulan IV tahun 2016, kontribusi PDB industri makanan dan minuman terhadap PDB nasional pada tahun 2016 akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Kontribusi ekspor produk industri makanan dan minuman terhadap ekspor nasional tahun 2016 adalah sebesar US\$ 26,28 Miliar dari total ekspor Indonesia sebesar US\$ 109,76 Miliar atau sebesar 23,93%. Nilai tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sehingga nilai capaiannya adalah sebesar 674%. Kontribusi ekspor ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 3,5%. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus membaik di tahun 2016 sebagai dampak positif dari harga komoditi global yang terus membaik.

Pangsa pasar produk industri makanan, hasil laut dan perikanan nasional terhadap total permintaan pasar dalam negeri pada tahun 2016 adalah sebesar 5,17% atau mencapai 101,3% dari target yang ditetapkan sebesar 5,1%. Capaian sasaran strategis ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 5,58%.

Pada tahun 2016 produktivitas dan kemampuan SDM industri sebesar Rp. 382.200,-/tenaga kerja/jam. Nilai tersebut didapatkan dari nilai produksi dibagi jumlah tenaga kerja dibagi jam kerja dengan asumsi 2400 jam kerja/tahun. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 299.000,- atau mencapai 127,8%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dimana produktivitas dan kemampuan SDM industri makanan sebesar Rp. 296.295,-/tenaga kerja/jam, maka pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan.

Realisasi investasi PMDN sektor industri makanan sampai dengan triwulan III tahun 2016 adalah sebesar 7.369,63 Miliar Rupiah dan realisasi investasi PMA adalah sebesar 632,24 Juta US Dollar atau total keseluruhan sebesar 45,56 Triliun Rupiah. Realisasi investasi sektor industri makanan ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 34,28 Triliun Rupiah sehingga capaian untuk sasaran strategis ini adalah sebesar 132,9%. Jika dibandingkan dengan realisasi investasi pada tahun 2015, maka pada tahun 2016 ini mengalami kenaikan sebesar 79 Miliar Rupiah. Kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik di tahun 2016, mampu meningkatkan iklim investasi industri sehingga realisasi investasi pada tahun 2016 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Jumlah tenaga kerja yang diserap industri makanan pada tahun 2016 adalah sebesar 2,8 juta orang. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,63 juta orang atau pemenuhan target adalah sebesar 444,4%. Namun jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang diserap industri pada tahun 2015 sebesar 3,16 juta orang.

Secara umum rata-rata capaian kinerja terhadap target pada rencana strategis adalah sebesar 238.68%

3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kinerja antara lain:

- Tumbuhnya iklim investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan. Hal ini dapat dilihat dari munculnya unit usaha baru pada tahun 2016, yang menyebabkan naiknya nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan serta meningkatnya produktivitas tenaga kerja
- Terjadi kenaikan harga komoditi global yang terus membaik
- Belanja negara melalui pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi

Adapun faktor-faktor yang menghambat diantaranya:

- Keterbatasan ketersediaan bahan baku dalam negeri untuk industri
- Adanya permasalahan terkait persyaratan impor pangan segar
- Terganggunya persediaan kemasan sebagai akibat dari adanya wacana cukai kemasan plastik

Alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan koordinasi antar sektor-sektor terkait untuk mengatasi permasalahan penyediaan bahan baku industri dan permasalahan terkait impor pangan segar
- Meningkatkan koordinasi antar sektor-sektor terkait untuk mengatasi permasalahan terkait cukai kemasan plastik

3.1.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran kinerja merupakan dasar dari penilaian capaian kinerja kegiatan/program/kebijaksanaan. Dari pengukuran kinerja dapat diketahui nilai capaian indikator kinerja kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Capaian Keuangan dan Fisik Tahun 2016

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	CAPAIAN TAHUN 2016		
		% APBN-P	% SELF BLOCKING	% FISIK
7	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	33,76	99.96	47.12
1835	Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	33,76	99.96	47.12
1835.020	Rekomendasi Pengembangan Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	57,95	99.18	69.10
1835.021	Standar Pada Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	62,23	100.00	75.15

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	CAPAIAN TAHUN 2016		
		% APBN-P	% SELF BLOCKING	% FISIK
1835.022	Skkni Pada Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	75,20	100.00	86.74
1835.023	Industri Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman, Hibah Dan/atau Penyertaan Modal Bagi Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	68,30	100.00	73.89
1835.024	Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	64,84	100.00	71.23
1835.025	Perusahaan Yang Mendapatkan Fasilitas Promosi Produk Dan Investasi	95,82	100.00	100.00
1835.026	Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	74,44	100.00	80.79
1835.027	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	28,75	99.93	57.79
1835.031	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktifitas Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	45,39	99.98	60.90
1835.032	Rancangan Standar Nasional Indonesia Terkait Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	10,67	99.49	28.50
1835.033	Sni Wajib Terkait Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	24,43	100.00	45.00
1835.034	Perusahaan Berbasis Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Yang Menerapkan Standar Mutu	68,12	99.96	83.00
1835.035	Pengawasan Sni Wajib Terkait Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	14,24	100.00	30.00
1835.037	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (rskkni) Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	11,94	99.99	24.41
1835.039	Sdm Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Yang Mengikuti Diklat	23,32	99.99	32.58
1835.04	Bantuan Mesin Dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	30,14	100.00	41.84
1835.042	Perusahaan Yang Difasilitasi Pada Promosi/pameran Produk Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	46,07	100.00	52.25
1835.046	Dukungan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Unit Eselon Ii	47,29	99.99	62.26
	TOTAL	33,76	99.96	47.12

Berdasarkan capaian Penetapan Kinerja, Dokumen Rencana Strategis 2015-2019, realisasi fisik dan realisasi penyerapan anggaran tahun 2016, maka rasio penggunaan anggaran Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 3.14. Rasio Capaian Kinerja Terhadap Penyerapan Anggaran

No	Uraian	Capaian (%)	Rasio terhadap penyerapan anggaran (%)
1	Penetapan Kinerja	165,78	20,36
2	Rencana Strategis 2015-2019	238,68	14,14
3	Realisasi Fisik	47,12	71,64
Rata-rata			35,38

Berdasarkan nilai tersebut, maka pencapaian ketiga capaian kinerja tersebut menggunakan 35,38% dari total PAGU anggaran yang dialokasikan.

3.1.5. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016, menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala eksternal. Adanya penetapan APBN-Perubahan pada bulan Juni 2016 oleh Pemerintah dan kemudian dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016 pada bulan Agustus yang menginstruksikan Pimpinan K/L untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme blokir mandiri (*self-blocking*). Terjadinya perubahan-perubahan alokasi PAGU anggaran ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi capaian kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi keuangan pada tahun 2016 untuk masing-masing kegiatan berdasarkan e-Monitoring APBN sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan PAGU APBN-P dan PAGU *Self-blocking* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2016

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU		REALISASI		
		APBN-P	SELF BLOCKING	JUMLAH	% APBN-P	% SELF BLOCKING
7	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	55,485,681,000	18,741,149,000	18,733,544,582	33,76	99.96
1835	Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	55,485,681,000	18,741,149,000	18,733,544,582	33,76	99.96
1835.020	Rekomendasi Pengembangan Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	999,965,000	584,293,000	579,489,429	57,95	99.18
1	Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha Industri	861,775,000	509,556,000	504,752,829	58,57	99.06
51	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Laut	90,120,000	62,695,000	62,694,200	69,57	100.00
52	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Kelapa	91,220,000	39,741,000	39,741,000	43,57	100.00
53	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pakan	199,995,000	82,940,000	82,940,000	41,47	100.00
55	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Makanan Berbasis Crude Palm Oil (cpo)	42,710,000	23,750,000	23,750,000	55,61	100.00
56	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Tepung Non Gandum	53,440,000	36,502,000	36,501,400	68,30	100.00
57	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Gula	161,025,000	117,482,000	112,681,909	69,98	95.91
58	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Makanan Hasil Perkebunan	106,450,000	73,364,000	73,363,200	68,92	100.00
59	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Tanaman Pangan	116,815,000	73,082,000	73,081,120	62,56	100.00
2	Rekomendasi Peningkatan Daya Saing Industri	41,440,000	24,840,000	24,840,000	59,94	100.00
66	Partisipasi Pada Sidang Standarisasi Internasional	41,440,000	24,840,000	24,840,000	59,94	100.00
3	Rekomendasi Peningkatan Invenstasi Industri	96,750,000	49,897,000	49,896,600	51,57	100.00
67	Partisipasi Dalam Forum Kerjasama Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan	96,750,000	49,897,000	49,896,600	51,57	100.00
1835.021	Standar Pada Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	396,715,000	246,865,000	246,863,900	62,23	100.00
51	Perumusan Dan Revisi Sni Industri Makanan	199,380,000	115,274,000	115,274,000	57,82	100.00

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU		REALISASI		
		APBN-P	SELF BLOCKING	JUMLAH	% APBN-P	% SELF BLOCKING
52	Pengawasan Sni Wajib Produk Industri Makanan Hasil Tanaman Pangan	36,050,000	28,078,000	28,078,000	77,89	100.00
53	Penyusunan Peraturan Penerapan Sni Wajib Produk Makanan, Hasil Tanaman Pangan	105,440,000	70,084,000	70,083,800	66,47	100.00
54	Penyusunan, Revisi Dan Pengawasan Pemberlakuan Sni Wajib Produk Industri Makanan Hasil Perkebunan	55,845,000	33,429,000	33,428,100	59,86	100.00
1835.022	Skkni Pada Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	152,545,000	114,710,000	114,710,000	75,20	100.00
51	Penyusunan Rskkni Di Bidang Industri Minyak Goreng Sawit	24,000,000	21,475,000	21,475,000	89,48	100.00
52	Penyusunan Rskkni Di Bidang Industri Biskuit	24,875,000	23,475,000	23,475,000	94,37	100.00
53	Penyusunan Rskkni Di Bidang Industri Mi Instan	25,875,000	24,075,000	24,075,000	93,04	100.00
54	Penyusunan Kkni Industri Pengolahan Daging	77,795,000	45,685,000	45,685,000	58,72	100.00
1835.023	Industri Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman, Hibah Dan/atau Penyertaan Modal Bagi Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	107,224,000	73,232,000	73,230,500	68,30	100.00
51	Bantuan Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan Rumput Laut Dalam Rangka Pengembangan Pusat Pendidikan Dan Teknologi Proses Pengolahan Rumput Laut Terpadu	27,224,000	27,224,000	27,223,400	100,00	100.00
52	Bantuan Alat Pendingin Blast Freezer Untuk Industri Pengolahan Ikan Di Banda	80,000,000	46,008,000	46,007,100	57,51	100.00
1835.024	Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	122,080,000	79,161,000	79,160,800	64,84	100.00
51	Penerapan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Melalui Cppob Pada Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	56,020,000	49,779,000	49,778,800	88,86	100.00
52	Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri Pakan Ternak	39,780,000	26,232,000	26,232,000	65,94	100.00
54	Pelatihan Sdm Industri Pengolahan Rumput Laut	26,280,000	3,150,000	3,150,000	11,99	100.00

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU		REALISASI		
		APBN-P	SELF BLOCKING	JUMLAH	% APBN-P	% SELF BLOCKING
1835.025	Perusahaan Yang Mendapatkan Fasilitas Promosi Produk Dan Investasi	166,620,000	159,655,000	159,654,100	95,82	100.00
51	Partisipasi Pada Pelaksanaan Pameran Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Di Dalam Negeri	57,100,000	52,450,000	52,449,300	91,86	100.00
52	Partisipasi Pelaksanaan Pada Pameran Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Di Luar Negeri	109,520,000	107,205,000	107,204,800	97,89	100.00
1835.026	Rumusan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	346,010,000	257,588,000	257,587,000	74,44	100.00
51	Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	78,500,000	70,784,000	70,783,800	90,17	100.00
52	Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	144,450,000	137,715,000	137,714,900	95,34	100.00
53	Penyusunan Laporan, Pendataan Dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	123,060,000	49,089,000	49,088,300	39,89	100.00
1835.027	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	3,923,785,000	1,129,013,000	1,128,173,350	28,75	99.93
1	Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal	1,158,565,000	181,896,000	181,473,600	15,66	99.77
55	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Makanan Berbasis Crude Palm Oil (cpo)	719,590,000	51,180,000	51,178,000	7,11	100.00
57	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Gula	438,975,000	130,716,000	130,295,600	29,68	99.68
2	Rekomendasi Kebijakan Insentif Non-fiskal	2,765,220,000	947,117,000	946,699,750	34,24	99.96
51	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Laut	509,880,000	154,273,000	144,332,150	28,31	93.56
52	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Kelapa	508,780,000	107,952,000	117,488,600	23,09	100.00
56	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Tepung Non Gandum	546,560,000	179,277,000	179,270,600	32,80	100.00

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU		REALISASI		
		APBN-P	SELF BLOCKING	JUMLAH	% APBN-P	% SELF BLOCKING
64	Penyusunan Feasibility Study Dan Detail Engineering Design (ded) Industri Pengolahan Rumput Laut Di Sulawesi Selatan	1,200,000,000	505,615,000	505,608,400	42,13	100.00
1835.031	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Dan Produktifitas Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	6,146,217,000	2,790,430,000	2,789,738,486	45,39	99.98
1	Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal	1,140,190,000	756,200,000	756,194,158	66,32	100.00
53	Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pakan	340,190,000	86,025,000	86,019,158	25,29	99.99
60	Kajian Pengembangan Produk Industri Pengolahan Kelapa	800,000,000	670,175,000	670,175,000	83,77	100.00
2	Rekomendasi Kebijakan Insentif Non-fiskal	5,006,027,000	2,034,230,000	2,033,544,328	40,62	99.97
54	Fasilitasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Revitalisasi Industri Gula	500,000,000	0	0	0,00	0.00
58	Partisipasi Dalam Forum Kerjasama Dan Iklim Usaha Industri Makanan Hasil Perkebunan	996,800,000	198,597,000	197,993,280	19,86	99.70
59	Partisipasi Dalam Forum Kerjasama Dan Iklim Usaha Industri Tanaman Pangan	447,417,000	66,379,000	66,373,400	14,83	99.99
61	Verifikasi Kontrak Penjualan Dan Penyaluran Gula Kristal Rafinasi	1,600,000,000	1,561,900,000	1,561,900,000	97,62	100.00
66	Partisipasi Pada Sidang Standarisasi Internasional	758,560,000	68,164,000	68,153,300	8,98	99.98
67	Partisipasi Dalam Forum Kerjasama Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan	703,250,000	139,190,000	139,124,348	19,78	99.95
1835.032	Rancangan Standar Nasional Indonesia Terkait Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	1,850,134,000	198,433,000	197,422,700	10,67	99.49
51	Perumusan Dan Revisi Sni Industri Makanan	1,147,804,000	53,007,000	52,996,800	4,62	99.98
54	Penyusunan, Revisi Dan Pengawasan Pemberlakuan Sni Wajib Produk Industri Makanan Hasil Perkebunan	702,330,000	145,426,000	144,425,900	20,56	99.31
1835.033	Sni Wajib Terkait Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	583,770,000	142,607,000	142,605,400	24,43	100.00

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU		REALISASI		
		APBN-P	SELF BLOCKING	JUMLAH	% APBN-P	% SELF BLOCKING
53	Penyusunan Peraturan Penerapan Sni Wajib Produk Makanan, Hasil Tanaman Pangan	583,770,000	142,607,000	142,605,400	24,43	100.00
1835.034	Perusahaan Berbasis Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Yang Menerapkan Standar Mutu	443,980,000	302,550,000	302,433,652	68,12	99.96
51	Penerapan Dan Pembinaan Keamanan Pangan Melalui Cppob Pada Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	443,980,000	302,550,000	302,433,652	68,12	99.96
1835.035	Pengawasan Sni Wajib Terkait Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	749,385,000	106,686,000	106,681,000	14,24	100.00
52	Pengawasan Sni Wajib Produk Industri Makanan Hasil Tanaman Pangan	749,385,000	106,686,000	106,681,000	14,24	100.00
1835.037	Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (rskkni) Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	3,047,455,000	363,915,000	363,886,925	11,94	99.99
51	Penyusunan Unit Kompetensi Pada Rskkni Di Bidang Industri Gula Rafinasi	726,000,000	111,182,000	111,180,000	15,31	100.00
52	Penyusunan Unit Kompetensi Pada Rskkni Di Bidang Industri Tepung Terigu	725,125,000	79,084,000	79,073,200	10,90	99.99
53	Penyusunan Unit Kompetensi Pada Rskkni Di Bidang Industri Mi Instan	724,125,000	80,845,000	80,839,800	11,16	99.99
54	Penyusunan Rskkni Industri Pengolahan Daging Pada Sub Bidang Produksi	872,205,000	92,804,000	92,793,925	10,64	99.99
1835.039	Sdm Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Yang Mengikuti Diklat	703,608,000	164,089,000	164,077,800	23,32	99.99
52	Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri Pakan Ternak	329,888,000	164,089,000	164,077,800	49,74	99.99
54	Pelatihan Sdm Industri Pengolahan Rumput Laut	373,720,000	0	0	0,00	0.00
1835.040	Bantuan Mesin Dan/atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	28,092,776,000	8,466,637,000	8,466,636,600	30,14	100.00

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU		REALISASI		
		APBN-P	SELF BLOCKING	JUMLAH	% APBN-P	% SELF BLOCKING
51	Bantuan Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan Rumput Laut Dalam Rangka Pengembangan Pusat Pendidikan Dan Teknologi Proses Pengolahan Rumput Laut Terpadu	4,172,776,000	3,726,937,000	3,726,937,000	89,32	100.00
52	Bantuan Alat Pendingin Blast Freezer Untuk Industri Pengolahan Ikan Di Banda	4,920,000,000	4,739,700,000	4,739,699,600	96,34	100.00
53	Bantuan Mesin Dan Atau Peralatan Industri Gula	19,000,000,000	0	0	0,00	0.00
1835.042	Perusahaan Yang Difasilitasi Pada Promosi/pameran Produk Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	4,761,980,000	2,193,962,000	2,193,949,605	46,07	100.00
51	Partisipasi Pada Pelaksanaan Pameran Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Di Dalam Negeri	2,104,040,000	121,043,000	121,037,400	5,75	100.00
52	Partisipasi Pelaksanaan Pada Pameran Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Di Luar Negeri	2,657,940,000	2,072,919,000	2,072,912,205	77,99	100.00
1835.046	Dukungan Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Unit Eselon Ii	2,891,432,000	1,367,323,000	1,367,243,335	47,29	99.99
51	Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	604,267,000	526,729,000	526,697,493	87,16	99.99
52	Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	533,850,000	341,126,000	341,093,300	63,89	99.99
53	Penyusunan Laporan, Pendataan Dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	753,315,000	210,507,000	210,496,592	27,94	100.00
62	Evaluasi Kinerja Industri Pengguna Gula Impor	1,000,000,000	288,961,000	288,955,950	28,90	100.00
T O T A L		55,485,681,000	18,741,149,000	18,733,544,582	33,76	99.96

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan tahun 2016, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pada tahun 2016, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 105.683.581.000,-. Namun pada bulan Juni tahun 2016 Pemerintah menetapkan APBN-Perubahan sehingga alokasi anggaran untuk Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan berubah menjadi sebesar Rp. 55.485.681.000,-. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2016 melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016, tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016 alokasi anggaran Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan setelah mengalami kebijakan *self-blocking* menjadi sebesar Rp 18,741,149,000,-.
2. Capaian pelaksanaan kegiatan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun 2016, realisasi keuangan adalah sebesar Rp 18,733,544,582,- atau sebesar 99,96% dari PAGU *self-blocking*. Dan apabila berdasarkan PAGU APBN-P maka realisasi adalah sebesar 33,67%. Sedangkan capaian fisiknya adalah sebesar 47,12%.
3. Secara umum capaian kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun 2016, capaian dari Perjanjian Kinerja adalah sebesar 165,78% dan capaian Renstra 2015-2019 adalah sebesar 238,68%.
4. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan telah mencapai sebagian besar target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja maupun pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan tahun 2016 telah berjalan cukup baik.

4.2 Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi didalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian target kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan tahun 2016 antara lain:

1. Adanya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016 melalui mekanisme *self-blocking* dimana PAGU anggaran tetap berada pada DIPA Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, namun anggaran tersebut tidak dapat digunakan/dicairkan. Anggaran pada Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan yang terkena *self-blocking* adalah sebesar Rp 36.744.532.000,- atau mencapai 66,22% dari total PAGU anggaran semula yaitu sebesar Rp 55.485.681.000,-. Karena tidak melalui mekanisme pemotongan, maka seolah-olah anggaran tersebut belum direalisasikan, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran pada Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan terlihat sangat rendah.

2. Beberapa kegiatan merupakan kegiatan baru hasil revisi anggaran APBN-P yang keluar pada bulan Juni 2016 sehingga baru mulai dilakukan tahap persiapan. Saat akan dilaksanakan proses selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut terkena kebijakan *self-blocking* anggaran.
3. Adanya permasalahan terkait persyaratan impor pangan segar.
4. Terganggunya persediaan kemasan sebagai akibat dari adanya wacana cukai kemasan plastik.

4.3 Rekomendasi

Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan tahun 2016 adalah :

1. Membuat rencana penyerapan anggaran dengan cermat sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar pelaksanaan kegiatan tepat waktu dengan serapan anggaran yang akurat.
2. Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai dengan yang telah direncanakan selama 12 bulan dan berdasarkan pada Rencana Penarikan Anggaran (RPA).
3. Mempercepat pengerjaan pertanggungjawaban pelaksanaan suatu program kegiatan agar pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya dapat dicapai dengan optimal.
4. Meningkatkan koordinasi antar sektor-sektor terkait untuk mengatasi permasalahan penyediaan bahan baku industri dan permasalahan terkait impor pangan segar
5. Meningkatkan koordinasi antar sektor-sektor terkait untuk mengatasi permasalahan terkait cukai kemasan plastik.